**PENGARUH KUALITAS SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PP N0 71 TAHUN 2010**

**(STUDI KASUS PADA SKPD-SKPD PEMERINTAH**

**KOTA MALANG)**

Elsa Rosiana

*(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)*

*e-mail:Elsarosiana17@gmail.com*

Drs. Anwar Made, Se., M.Si

Doni Wirshandono Yogivaria, Se, Cpa, Ak

*(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)*

**ABSTRAK :** *Pada tahun 2015 seluruh SKPD yang ada di Republik Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual secara penuh. Beberapa kendala dan masalah dalam penerapannya yaitu belum siapnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas di pemerintah pusat serta belum siapnya peraturan dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Sampel penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang mencakup kepala bidang, sekretaris, dan staf bagian keuangan, sehingga menghasilkan sebanyak 40 sampel. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi yang sebelumnya dilakukan uji validitas, reabilitas atas data yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.*

**Kata Kunci**: Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, sap berbasis akrual

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha–usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara dalam meningkatkan transparasi laporan keuangan pemerintahan adalah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual seperti yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diakui dicatat dan disajikan berdasarkan waktu terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kasnya dibayarkan atau dilunasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang pencatatan keuangan dengan menggunakan basis akrual telah sah untuk segera dilaksanakan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2012) menyatakan bahwa Adanya pengaruh positif variabel kualias SDM tetapi tidak signifikan dan komunikasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual. Romilia (2011) menyatakan bahwa pelatihan staf keuangan mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi basis akurual. Herlina (2013) menyatakan bahwa Faktor informasi mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.

Dengan alasan demikian penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kesiapan satuan kerja pada SKPD- SKPD Kota Malang dalam menghadapi pergantian basis akuntansi kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teoritis

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat(3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

MenurutFakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standarakuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapatmemberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada*stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsiperencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitasdana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintahuntuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**Basis Akrual**

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP(2006:3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa **l**ainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saatterjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kasditerima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan(*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapatmenyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumbe daya dicatat.

**Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”.

**Perbedaan PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010**

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini, sebenarnya sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Walaupun PP ini menginstruksikan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun masih diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015. Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005, utamanya terkait dengan komponen laporan keuangan, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

 **Perbedaan Komponen Laporan Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **PP NO 24 Tahun 2005****(Basis Kas Menuju Akrual)** | **PP NO 71 Tahun 2010****(Basis Akrual)** |
| * Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
* Laporan Arus Kas
* Neraca
* Catatan Atas Laporan Keuangan
 | * Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
* Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih* Neraca
* Laporan Arus Kas
* Laporan Operasional
* Laporan Perubahan Ekuitas
* Pencatatan Atas Laporan Keuangan
 |

Sumber :Hariyanto,2012

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Macmillan (2003) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya dan arahan yang terdiri dari: Pernyataan konsep akuntansi (*Statements of* *accounting concepts*), Pernyataan Standar Akuntansi (*Statements of* *accounting standards*), Kebijakan Akuntansi (*Accounting policies*), Petunjuk, pelatihan, bahan-bahan dan tulisan (*Manuals, training* *materials, and text*), Petunjuk Laporan Keuangan (*Financial statement* *instruction*), akuntan yang memiliki kompetensi dan professional (*Accountants with the competence and the professional*), Kemampuan dalam teknologi informasi (*Capabilities in information technology*), hukum dan peraturan yang terkait dengan laporan keuangan (*Laws and* *regulations related to financial reporting*), hubungan dengan Asosiasi dan badan akuntansi internasional (*Links to international accounting)* *bodies and associations*). Aren (2008) menyebutkan bahwa tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Sistem Pengendalian Intern emerintah yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian intern tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Bastian, dalam Forum Dosen Akuntansi Publik (2006) menyatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualiatas memerlukan Sumber Daya Manusia yang menguasai Akuntansi Pemerintahan. Sumber Daya Manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan. Betapapun bagusnya Standar Akuntansi Pemerintahan, tanpa didukung Sumber Daya Manusia yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Nordiawan (2006) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

**Kendala Akuntansi Berbasis Akrual di pemerintahan Indonesia**

Menurut Widjajarso (2010) permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan basis akuntansi pada akuntansi pemerintah Indonesia dapat mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual
2. Jenis laporan keuangan
3. Anggaran berbasis akrual
4. Pengakuan pendapatan
5. Pengakuan pajak belanja/beban

Tantangan dalam Implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Simanjuntak (2010:10-12) adalah sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi dan *IT based system*
2. Komitmen dari pimpinan
3. ersedianya sumber daya yang kompeten
4. Resistensi terhadap perubahan

**Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno 2009). Menurut Tjiptoherijanto (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi , termasuk akuntansi , dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan – pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

**Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto,2012) Teknologi informasi meliputi komputer, pernagkat lunak (*software*),*database*, jaringan (internet, intranet),*electronic commerce*,dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al.,2010). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP , Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data ,pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar

**Kerangka Konseptual**

Kualitas SDM

Penerapan Akrual Basis

Teknologi Informasi

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap penerapan SAP Berbasis Akrual

Nazier (2009) mengungkapkan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Tingkat pemahaman dasar melingkup keuangan negara, bentuk pertanggung jawaban keuangan negara, standar akuntansi yang digunakan, dan subtansi standar akuntansi pemerintahan. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. Kusuma (2013) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Temuan empiris dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan Aldiani (2010), Ardiansyah (2012), Faradillah (2013), dan Herlina (2013) menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa :

H1 : Kualitas Sumber Daya Manusia akan berpengaruh secara positif terhadap penerapan PP NO 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual pada SKPD – SKPD Kota Malang.

**Pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual**

Kusuma (2013) menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013) yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Akibatnya , kualitas tinggi yang ada di dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan (Ouda, dalam Kusuma, 2013). Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut :

H2 : Teknologi informasi akan berpengaruh secara positif terhadap penerapan PP NO 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual pada SKPD-SKPD Kota Malang.

**Metode Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, jenis penetitian yang akan dipakai adalah penelitian korelasional yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel variabel yang berbeda dalam suatu populasi. ( Singarimbum dan Effendi, 2012). Peneliti ini menguji seberapa besar peran SDM dan Teknologi informasi terhadap efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah basis akrual pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

**Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencangkup Pengaruh kualitas SDM dan teknologi informasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

**Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan sebanyak 40 pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai tempat pengambilan populasi untuk memperoleh data mengenai masalah yang akan diteliti penulis memilih Dinas Perhubungan Kota Malang yang beralamat di Jalan Raden Intan No.1, Blimbing, Kota Malang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang yang beralamat di Jalan Raden Intan No 1, Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang beralamat di Jalan Raden Intan No 1 dan Dinas Pendapatan yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono, Kota Malang. Karena jumlah populasi sebanyak 40 pegawai maka peneliti mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kuantitatif.Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperolah dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperolah atau mengumpulkan keterangan untuk slanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri hasil penyebaran kuesioner dan wawancara berupa tanya jawab langsung dengan penyusun laporan keuangan dan ahli Teknologi.

**Teknik Pengambilan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data primer dan keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti, dan pelaksanaanya melalui kuisioner yang akan diisi atau dijawab oleh pihak pihak yang berwenang dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan yang tersebar di beberapa unit-unit Dinas Perhubungan Kota Malang. Kuisioner akan diberikan langsung kepada responden. Responden diminta mengisi daftar tersebut, kemudian diminta untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi tersebut.

Pengumpulan data Skunder dilakukan dengan cara meminta langsung dengan metode wawancara mengenai jumlah pegawai di SKPD tersebut.

**Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang telah diambil oleh penulis, maka pengelompokkan variabel-variabel yang mencangkup judul tersebut terbagi atas tiga variabel. Yaitu dua variabel bebas (variabel independen) dan satu variabel terikat (variabel dependen) yakni, kualitas sumber daya manusia sebagai variabel independen (X1), teknologi informasi sebagai variabel independen (X2) dan penerapan laporan keuangan berbasis akrual sebagai variabel dependen (Y).

**Tabel 3.1**

**Variabel Independen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Konsep Variabel** | **Indikator** | **Skala** | **Instrumen** |
| Sumber Daya Manusia(X1) | Menurut The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) dalam Mullins (2005). Sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi. | * Pengetahuan
* Pelatihan
* Pengalaman
* Skill/Keterampilan
* Lingkungan Pengendalian
* Attidude/Sikap
* Pengelolaan Barang Milik Daerah
* Penatausahaan Keuangan Daerah
 | Ordinal | Kuisioner |
| Teknologi Informasi (X2) | Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (hardware dan software) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komuni,kasi untuk mengirimkan informasi. | * Komputer
* Jaringan Internet
 | Ordinal | Kuisioner |

**Tabel 3.2**

**Variabel dependen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Konsep Variabel** | **Indikator** | **Skala** | **Instrumen** |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual | Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis). | * Handal
 | Ordinal | Kuesioner |

**Instrumen Penelitian**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan penyebaran angket atau kuesioner. Kuesioner dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi secara tertulis kepada responden.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskribtif .Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : Jabatan, lama pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, pelatihan dibidangnya. Alat analisis data ini disajikan dengan mengundang tabel distribusi frekuensi yang menjelaskan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

 **Pengujian Validitas dan Reliabilitas**

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya diukur (Ghozali, 2005). Yaitu mengkorelasikan indikator-indikator setiap variabel dengan skor totalnya. Kriterianya apabila nilai signifikan suatu variabel tersebut lebih kecil dari alpha = 0,05 (5%), berarti alat ukur tersebut memiliki validitas yang tinggi. Artinya pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengukur fungsi ukurannya sesuai yang diinginkan.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner yang digunakan jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Kriterianya adalah jika nilai koefisian alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliabel.

**Metode Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda untuk menguji pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut

Y = a + b1X1 + b2X2 +e

Keterangan :

Y = Variabel terikat

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi variabel bebas X1

b2 = Koefisien regresi variabel bebas X2

X1 = Kualitas SDM

X2 = Kualitas Teknologi Informasi

E = Kesalahan pengganggu (error)

**Pengujian Asumsi Klasik**

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang ada. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedasitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik dan statistik. Metode grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dngan meliha normal *probabily plot.*

1. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat Model regresi yang bebas multikolearitas adalah yang memiliki VIF = 10 dan nilai tolerance = 0,1. Untuk melihat variabel bebas dimana saja saling berkolerasi adalah dengan metode menganalisis matriks korelasi antar variabel bebas. Korelasi yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa variabel bebas tidak multikolearitas yang serius. (Ghozali, 2005)

1. Uji Heteroskedastitas

 Dasar analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedasitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2005).

**Pembahasan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Koefisien korelasi yang sudah distandarisai** | **Nilai Sign.** | **Simpulan** |
| **X1** |  |  |  |
| **X2** |  |  |  |

**Hipotesis Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual**

Adanya pengaruh positif variabel kualitas SDM terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas SDM maka semakin tinggi pula pengaruhnya dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual. SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.

**Hipotesis Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual**

variabel teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Koefisien variabel Teknologi Informasi adalah negatif, hal ini berarti meningkatkan persepsi responden bahwa semakin tinggi teknologi informasi maka penerapan laporan keuangan berbasis akrual semakin turun.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang pengaruh kualitas SDM dan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual , maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda secara parsial diketahui terdapat pengaruh signifikan kualitas SDM terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini dijelaskan didalam faktor Pengetahuan, pelatihan, pengalaman, skill/Keterampilan semakin tinggi yang dimiliki seorang akuntan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Karena dengan demikian akuntan dapat mengetahui dan menyelesaikan berbagai masalah dalam pembuatan laporan keuangan berbasis akrual secara semakin mendalam.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda secara parsial diketahui tidak ada pengaruh signifikan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan hanya sebagian SDM yang dapat mengoperasikan teknologi yang ada. Sehingga teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal, pengimplementasian teknologi informasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.

Saran

 Berdasarkan uraian diatas, beberapa saran yang dapat dipberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Malang, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas melalui perekrutan pegawai dengan syarat pekerjaan (*job requirement)* yang jelas untuk bidang akuntansi dan keuangan, menempatkan ulang *(repositioning)* pegawai yang sudah mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi kepada bidang pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan maupun perpajakan.
2. Untuk meningkatkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka dibutuhkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan secara komprehensif, tidak saja Peraturan Pemerintah PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga buletin teknis akuntansi serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan masalah pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga perlu dikawal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif dan efisien.Penerapan Sistem Pengendalian Intern berfungsi untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
3. Teknologi informasi yang meliputi konputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data serta keakuratan dan tepat waktu, sehingga teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan memberikan pengarahan penggunaan teknologi informasi pada SDM
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil peneliti ini agar dapat dijadikan litelatur atau referensi di dalam melakukan penelitian yang selanjutnya. Selain itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel baru yang sesuai dengan penelitian ini agar hasil penelitian dapat berkembang lebih baik lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aldiani, Sulani. (2010). *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.Universitas Sumatra Utara.

Ardiansyah, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Satuan Kerjadi Wilayah Kerja KPPN Malang). *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya.

Aren, Alvin A, Randal J, Beasly, dan Mark S. 2008. *Auditing dan* *Pelayanan Verfikasi*. Jakarta: PT Indeks IKAPI

Arliana, Gaybi. 2011. Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Kajian Fenomenologi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar). *Skripsi*. Makassar. Universitas Hasanuddin

Awami, Suharsimi. 2002. *Transparansi Akuntabilitas* *Keuangan Daerah: ‘Mati Angin’ buat Korupsi*.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Davis, F.D et al. 1989. “*Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information System Technology”*. *MIS Quarterly*. Vol.13, No. 3, pp. 319-339.

Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). *Skripsi*. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

[http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan](http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/.)

Diakses tanggal 12 Desember 2015.

Forum Dosen Akuntansi Publik.2006. *Standar Akuntansi Publik* *Telaah Kritis PP No.24 Tahun 2005*.Yogyakarta:BPFE

Gibson, James L et al 2006, “*Organizations (Behavior, Structure, Processes),*” Twelfth Edition, McGrow Hill

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi,* XI, Pontianak 23-25 Juli 2008.

KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (http://ksap.org/memorandum). Diakses tanggal 9 April 2012.

KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.* Makalah disajikan dalam Seminar PentahapanImplementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.

KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam SeminarNasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar.

Luthans, F. 2010. *Organizational Behaviour*. 8th edition. Singapura: McGraw-Hill

Macmillan, Graeme.et al. 2003. *Improving Government Financial Reporting: The Window to Good Governance.*The Governance

Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD*.

(<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2015/10/akuntansi-berbasisakrual.pdf>).

Nazier, Daeng M. 2009. *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*,Makalah dalam Seminar Nasional tentang “Peningkatan Transparansi dan AkuntabilitasKeuangan Negara dan Daerah Melalui PengembanganKapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah ” Tanggal 22 Juli 2009 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; h.1. (www.google.com) [11/12/2015].

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar* *Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah RI, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang *Standar* *Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah RI ,2010. Peraturan Pemerintah Nomor 64/20103 tentang *Standar* *Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah RI, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Robbins, S. P. Et al. 2006. *Organizational Behavior: Concept, Controversies*, Application. Edisi 8: Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember 2010.

Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan*. [http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf](http://www.ksap.org/Riset%26Artikel/Art8.pdf).(10-12-2015)

Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Thompson, R.L.et al., Higgins, C.A., and Howell, J.W. 1991. *“Personal Computing:Toward a Conceptual Model of Utilization”. MIS Quarterly.* March. Vol.15, No.1, pp.124-143.

Warisno. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinersja Satauan Kkerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Widjajarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*

[http://Sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akrual-pdf.](http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akrual-pdf)

Diakses tanggal 9 April 2012.

Wijaya, Henryanto. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313-323

Williams, B.K. and Sawyer, S.C.et al. 2011. “*Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications. (9th edition)”.* New York: McGraw-Hill

[www.wikiapbn.com.](http://www.wikiapbn.com/) Diakses tanggal 25 Desember 2015.